



# RENCANA KERJA (RENJA)



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2023**



# **R E N J A**

**RENCANA KERJA  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2023**



**RENCANA KERJA**  
**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan**  
**Menengah Kabupaten Kebumen**  
**Tahun 2023**

---

**KATA PENGANTAR**

**P**uji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023.

Dengan disusunnya RENJA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tahun 2023 ini maka kami mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun kedepan. RENJA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tahun 2023 merupakan komitmen dari seluruh aparatur Dinas dalam rangka memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas kepada masyarakat di bidang perindustrian, perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen yang disusun secara sistematis dan sinergis dalam upaya mendukung Visi Bupati Terpilih Kabupaten Kebumen “**KEBUMEN SEMARAK** = Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

RENJA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang akan dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana sehingga dapat dicapai sasaran dari suatu kegiatan secara efektif dan efisien.

Dokumen RENJA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebagai pedoman, arah dan upaya dalam pengembangan serta pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan di bidang perindustrian, perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Kebumen

Kebumen, 28 Maret 2022  
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,  
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Kebumen

  
**Drs. FRANS HAIDAR, MPA**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19681229 199009 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
 Bab I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
 Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tahun lalu dan Capaian RenstraDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.....	13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	30
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.....	32
2.4. Review Terhadap rancangan Awal Recana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten KebumenTahun 2023 .....	36
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	46
 Bab III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	49
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.....	52
3.3. Program dan Kegiatan .....	53
 Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN.....	67
Bab V PENUTUP.....	77

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 .....	17
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.....	31
Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja DinasPerindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan MenengahKabupaten Kebumen Tahun 2023 .....	38
Tabel 2.4. Usulan Musrenbangcam, kuota Kecamatan dan Pokir DPRD....	47
Tabel 3.1. Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Sasaran Strategis Kementrian Perindustrian beserta Faktor Penghambat dan pendorong.....	49
Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Sasaran Strategis Kementrian Perdagangan beserta Faktor Penghambat dan pendorong.....	50
Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan perdagangan provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan pendorong.....	51
Tabel 3.4. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 .....	53
Tabel 3.5. Program, Kegiatandan Sub kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen .....	55
Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen .....	68

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Berita Acara Forum PD 2022 beserta lampirannya.....	77
2. Daftar Hadir Forum PD 2022 .....	79
3. Notulen Forum PD 2022 .....	82





SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2023 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI KEBUMEN,  
ttd.  
ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,  
ttd.  
AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 50

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,  
**SETDA**  
IRA PUSPITASARI, SH., M.Ec.Dev  
Pembina  
NIP. 19800417 200604 2 015

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 13 Juli 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah dengan type A.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2023 merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari Rencana Strategis Tahun 2021–2026 yang diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan adanya Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 yang telah tersusun dengan baik secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus. Manfaat pembangunan industri, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah secara langsung bagi daerah adalah peningkatan jumlah tenaga kerja dan kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah, peningkatan sumber daya manusia dan secara tidak langsung yaitu pemanfaatan potensi pasar domestik dan ekspor, peningkatan kemampuan pertumbuhan industri daerah.

Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut diatas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah
2. penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah
3. pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah.
4. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah
5. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah.
6. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutahiran data dan pemberian informasi di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah.

7. pelaksanaan pendataan, penetapan, perencanaan, penerimaan, penagihan, intensifikasi, ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan retribusi pasar daerah serta pendapatan lain-lain sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
8. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah dan swasta;
9. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, hukum, organisasi dan tata laksana dan perlengkapan; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perencanaan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan suatu wilayah, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik.

Cakupan perencanaan pembangunan nasional harus memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Perencanaan yang disusun dari tingkat pusat sampai daerah memiliki beberapa jenjang di antaranya rencana pembangunan jangka panjang, Rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, untuk menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 tahun, dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan pemerintah di atasnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara



perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah telah dijelaskan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat yang dimulai dengan menentukan sasaran, strategi kebijakan dan rencana detail untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Perencanaan Pembangunan Daerah sendiri diartikan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan (Stakeholder) memerlukan perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang, menengah maupun pendek agar dapat berjalan pada jalur yang khusus yang cepat dan tepat. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 mengacu pada perencanaan

Nasional dan Provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan baik dari tingkat pusat hingga daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip-prinsip dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 antara lain :

1. Substansi Renja Perangkat Daerah merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen resmi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) di daerah sangat dibutuhkan dalam mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini untuk menjamin kesesuaian dokumen perencanaan dengan kebutuhan seluruh *stakeholders*, oleh karena itu, Perangkat Daerah sebagai salah satu *stakeholder* kunci di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana, melalui penyusunan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah, yang kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah. Hal ini mengacu pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana

Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023.

## 1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023, landasan hukum yang digunakan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah



- Kabupaten Kebumen Nomor 188);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187);
  22. Rencana strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tahun 2021-2026.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan dan menyelaraskan prioritas program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dengan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja ini juga dimaksudkan untuk melakukan upaya sinkronisasi terhadap program-program provinsi dan nasional dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pembangunan daerah pada tahun 2023. Hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah kebijakan pemerintah daerah

Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah yang dirumuskan melalui program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen selama satu tahun anggaran, Tahun anggaran 2023. Untuk mengidentifikasi efektivitas berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi rencana kerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain hal tersebut, hasil/keluaran penyusunan rencana kerja ini menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen pada tahun 2023. Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun ke depan merupakan penjabaran dari prioritas tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah perlu ditetapkan program tahunan, sebagaimana tersebut yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 berpedoman pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### BAB I .PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, proses penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, keterkaitan antara Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

### 2.3. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

### 1.3. Maksud Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD  
Memuat kajian/review terhadap Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tahun lalu (tahun 2020) berdasarkan data LKPJ/LPPD/LKJIP, Perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2021), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sudah disahkan, Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, dan/atau Indikator Kinerja Kunci (diambil dari IKU Daerah dan IKU OPD) Capaian kinerja urusan yang diampu oleh OPD (opsional bagi OPD yang

memiliki kinerja urusan dengan mengambil data pada Narasi Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 bahan musrenbangkab).

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Berisikan uraian mengenai Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian programnasional/ internasional, seperti SPM dan SDGs, Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Usulan Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Berisikan uraian mengenai Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan (Renstra), Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari kecamatan, kelurahan, dan desa serta pokok-pokok pikiran DPRD yang langsung ditujukan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten (diambil dari hasil Musrenbangcam, Kuota Kecamatan, dan Pokir DPRD).

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN



## MENENGAH

### 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Pencapaian visi dan misi kepala daerah (Pencapaian IKU Daerah), Pencapaian SDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pencapaian IKU OPD, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan kewilayahan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: Jumlah program dan jumlah kegiatan, Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu), Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya, Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

## Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEBUMEN

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini

## BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN,**  
**PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja.

Pengukuran laporan kinerja ini diperlukan indikator Input (masukan) Output (Keluaran) dan outcome (hasil). Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. indikator Masukan (Input), yaitu indikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia , maupun berupa teknologi dan informasi, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. indikator keluaran (Output), yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik fisik maupun non fisik.
3. indikator hasil (Outcome), yaitu indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Suatu kegiatan dinilai ekonomis bila sumber daya alam yang digunakan sebaik-baiknya sebagai input kegiatan. Sedangkan penggunaan input sebaiknya untuk mendapatkan output secara maksimal dinamakan efisien. Selanjutnya, Seberapa besar output akan menghasilkan outcome dinamakan efektif.

Penilaian seberapa besar nilai ekonomis dan nilai efesien suatu kegiatan dapat dilihat secara langsung atau jangka pendek, karena output merupakan hasil langsung dari suatu kegiatan, namun sulit untuk menilai seberapa efektif suatu kegiatan karena efektifitas baru dapat dinilai pada jangka menengah yang membutuhkan beberapa tahun penelitian/penilaian.

## 1. Analisis Kinerja Output

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen pada Tahun Anggaran 2021 melaksanakan 13 (Tiga belas) program dan 22 (Dua puluh dua) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) subkegiatan yang telah dicanangkan pada tahun 2021 dan telah dilaksanakan dengan baik serta telah memberikan laporan akhir kinerja pada masing-masing kegiatan. Berdasarkan data-data yang ada, menunjukkan kinerja keluaran yang baik, yaitu capaian kinerjanya 88,60 % jika dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam DPA kegiatan. Artinya, hampir seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mampu melaksanakan dan merealisasikan indikator kinerja dengan baik.

Sedangkan untuk Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan 4 (empat) program dan 5 (Lima) kegiatan yang telah dicanangkan pada tahun 2021 dan telah dilaksanakan dengan baik serta telah memberikan laporan akhir kinerja pada masing-masing kegiatan. Berdasarkan data-data yang ada, menunjukkan kinerja keluaran yang baik, yaitu capaian kinerjanya 86,32 % jika dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam DPA kegiatan. Artinya, hampir seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mampu melaksanakan dan merealisasikan indikator kinerja dengan baik.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dari kegiatan, bahwa semua Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan telah berusaha maksimal dan telah berhasil dalam upaya merealisasikan target kinerja yang telah disepakati dalam DPA kegiatan di awal tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa staf Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen telah bekerja dengan keras dan bersungguh-sungguh dalam upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Kebumen.

## 2. Analisa Kinerja Keuangan

Analisa Kinerja keuangan dilakukan untuk melihat efisiensi realisasi penyerapan dana berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat melalui kinerja keuangan per program.

Pada Tahun 2021, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen melaksanakan 13 (Tiga belas) program 22 (Dua puluh dua) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) kegiatan. Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Pengembangan Data/Informasi
- d. Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan;
- e. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
- f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri;
- h. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;

- i. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
- j. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah;
- k. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan;
- l. Program Penataan Struktur Industri;
- m. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.

Berdasarkan realisasi keuangan hasil dari pelaksanaan 13 (tiga belas) program yang dijabarkan dalam 22 (dua puluh dua) kegiatan 43 (empat puluh tiga) subkegiatan telah melaporkan capaian kinerja keuangan sebesar 88,60 % (Sembilan puluh tiga koma tiga puluh tujuh persen) dari Total Belanja yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 20.412.075.000,00 (Duapuluh milyar empat ratus dua belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp 18.931.706.977,00 (Delapan belas milyar Sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 merupakan rencana program, kegiatan dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Pada dasarnya Rencana Kerja Tahun 2023 menguraikan target kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai pada Tahun 2023 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan.

Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja.

Sasaran dan kegiatan tahunan yang ditetapkan setiap tahun disesuaikan dengan kondisi terkini terutama untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah atau instansi/lembaga lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.



Dari analisa pencapaian kinerja pelayanan pada Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen telah melaksanakan capaian kinerjanya dengan cukup baik. Untuk rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021  
Dinas Perindustrian dan perdaganganKabupaten Kebumen

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes) kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2022	RealisasiTarget kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2020 (jutaan rupiah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2021 (jutaan rp)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/ 2021 (jutaan rupiah)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Programdan kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
	Lingkungan Hidup									
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan									
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	0	95,59						
	Statistik									
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah									
	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersediannya data statistik perindag	108	96,42						
	Urusan Pilihan									
	Perdagangan									
	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan									
	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan permasalahan konsumen	0	0						
	Peningkatan pengawasan	Terlaksanannya	293,3	95,46						

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes) kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2022	RealisasiTarget kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2020 (jutaan rupiah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2021 (jutaan rp)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/ 2021 (jutaan rupiah)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Programdan kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	peredaran barang dan jasa	Pengawasan dan Peredaran Barang dan Jasa								
	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Terlaksanannya Pengawasan Tera ulang dan Kemetrologian	2.026	96,35						
	Pengumpulan informasi pita cukai ilegal atau tidak dilekati pita cukai (DBHCHT)	Terlaksanannya pengawasan peredaran pita cukai palsu atau tidak dilekati pitacukai	220	99,89						
	Program peningkatan dan pengembangan ekspor									
	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Terlaksananya pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	460	94,98						
	Membangun jejaring dengan eksportir	Terbangunnya jejaring dengan eksportir	680	0						
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri									
	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	Terfasilitasi pengurusan dokumen ekspor bagi UMKM								

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes) kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2022	RealisasiTarget kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2020 (jutaan rupiah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2021 (jutaan rp)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/ 2021 (jutaan rupiah)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Programdan kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Tercukupinya data informasi kebutuhan bahan pokok masyarakat dan pengawasan barang bersubsidi	800	99,56						
	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	Terpenuhinya upah tenaga kerja kebersihan keamanan,pengelolaan sampah,operator pengelolaan sampah,entry data pasar dan parkir pasar pasar daerah	8.372,20	99,68						
	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Terlaksananya pameran inacraf, Kebumen Expo, dan Pengelolaan griya Pamen	769,80	96,43						
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Pasar - pasar Daerah	Terwujudnya pasar daerah yang aman dan nyaman (pemeliharaan pasar-pasar daerah)	25.000	98,89						
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Pasar - pasar Daerah (DAK)	Terwujudnya pasar pasar daerah yang aman dan nyaman (	3.872,18	0,78						
	Pengembangan pengelolaan gudang dengan Sistem Resi Gudang	Terlaksanannya Operasionalisasi sistem resi gudang di	1.184	95,11						

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes) kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2022	RealisasiTarget kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2020 (jutaan rupiah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2021 (jutaan rp)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/ 2021 (jutaan rupiah)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Programdan kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		kabupaten kebumen								
	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan									
	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Terfasilitasinya PKL dan Pembinaan PKL	705,60	94,11						
	Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan	Terfasilitasinya PKL dan penyuluhan PKL dan asongan	910	0						
	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Terfasilitasinya Tempat PKL dan asongan	850	99,68						
	Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan	Terfasilitasinya Pengawasan PKL dan asongan	960							
	Perindustrian									
	Program pengembangan industri kecil dan menengah									
	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Terlaksananya bantuan alat bagi IKM	1.625	97,77						
	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Terlaksananya bantuan alat dan pelatihan bagi IKM;	1.402,5	100,28						
	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan	Terciptanya izin PIRT bagi IKM, MD dan								

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes) kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2022	RealisasiTarget kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2020 (jutaan rupiah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2021 (jutaan rp)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/ 2021 (jutaan rupiah)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Programdan kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	menengah	sertifikasi (200 IKM PIRT; 20 IKM Halal dan 1 IKM Merek Dagang)								
	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi IKM di lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku IHT (DBHCHT)	Terlaksananya bantuan alat dan pelatihan bagi IKM ( 1kelompok bantuan alat dan 9 Pelatihan/magang IKM)	1.760	90,99						
	Program peningkatan kapasitas Iptek Sistem Produksi									
	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Terlaksananya fasilitasi sertifikasi HKI untuk IKM	366							
	Pengembangan Sistem Inovasi teknologi industri	Terlaksananya kegiatan pendataan industry kreatif serta kegiatan industry kreatif lainnya	450	98,95						
	Program penataan struktur industri									
	Penyusunan Rencana Induk Industri Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Industri Daerah Kabupaten Kebumen	450	62,57						
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan									

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes) kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2022	RealisasiTarget kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2020 (jutaan rupiah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2021 (jutaan rp)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/ 2021 (jutaan rupiah)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Programdan kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Perencanaan Pembangunan									
	Program pengembangan data/informasi									
	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya Renja RKA, DPA LAKIP, LKPJ,LPPD	226	98,14						
	Kuangan									
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah									
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Tercapainya target pendapatan daerah	1.716,5	97,63						
	Fasilitasi peningkatan PAD	Tersedianya kelengkapan retribusi, alat kelengkapan retribusi dan terinformasinya tariff retribusi	325							
	Fungsi Lainnya									
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan									
	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tersosialisasinya peraturan perundang undangan	0	0						
	Program Pendukung Operasional SKPD									
	Program Pendukung									



No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes) kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2022	RealisasiTarget kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2020 (jutaan rupiah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2021 (jutaan rp)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/ 2021 (jutaan rupiah)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Programdan kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Operasional SKPD									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya pelayanan surat menyurat	23,4	100						
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya biaya kantor untuk listrik, air dan telepon	2.597	84,55						
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan BBM kendaraan Dinas	653,5	93,09						
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya penatausahaan keuangan SKPD	435	99,16						
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya jasa Kebersihan kantor	42,7	100						
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja	152,5	83,12						
	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	239	100						
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	1.281	97,07						
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya ikomponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor	142,5	100						

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes) kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2022	RealisasiTarget kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2020 (jutaan rupiah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2021 (jutaan rp)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/ 2021 (jutaan rupiah)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Programdan kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianyabahan bacaan dan peraturan perundang undangan	24,3	100						
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat dan jamuan	175	97,17						
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	550	99,88						
	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Upah Non PNS	1.580,5	91,98						
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersediannya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	178	99,23						
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya Aula Gedung Kantor	4.910	0						
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedia Kendaraan Dinas / Operasional	1.136,5	96,06						
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	442	99,40						
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung kantor	222	97,60						
	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Mebeleur	300	99,41						

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes) kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2022	RealisasiTarget kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2020 (jutaan rupiah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2021 (jutaan rp)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/ 2021 (jutaan rupiah)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Programdan kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	655	99,74						
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kebersihan pasar	Terawatnya kebersihan pasar		99,01						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KAB/KOTA									
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah dokumen Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, DPP, LKJiP, Tapkin, LKPJ/LPPD, Renstra	0	0	50	27,62	55,24	50	27,62	55,24
	Evaluasi kinerja PD	Jumlah data pedagang pasar dan asset	0		35	15,66	44,74	35	15,66	44,74
	<i>Admnistrasi Keuangan PD</i>									
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji, tunjangan untuk ASN	0		8.237,80	6.035,25	73,26	10.550,3	6.035,25	73,26
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	0		115,00	60,56	52,66	125,00	60,56	52,66
	<i>Administrasi Kepegawaian PD</i>									
	Sosialisasi Peraturan Per-UU	Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perUU	0		100,00	21,43	21,43	100,00	21,43	21,43
	Pendidikan dan Pelatihan							105		

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes) kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2022	RealisasiTarget kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2020 (jutaan rupiah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2021 (jutaan rp)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/ 2021 (jutaan rupiah)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Programdan kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi									
	<i>Administrasi Umum PD</i>									
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya pengadaan komponen instalasi listrik / penerangan	0		20,00	11,91	59,60	25,00	11,91	59,60
	Penyediaan bahan logistic kantor	Terpenuhinya pengadaan makan minum rapat dan tamu	0		24,50	11,17	45,58	30	11,17	45,58
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pengadaan cetak karcis, penggandaan dan jilid	0		150,00	146,65	97,77	350,00	146,65	97,77
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per UU	Terpenuhinya bahan bacaan dan surat kabar / majalah	0		3,50	2,01	57,46	5	2,01	57,46
	Penyediaan bahan / material	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	0		54,60	35,43	64,88	65	35,43	64,88
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan koordinasi ke pusat, provinsi dan luar daerah	0		96,00	24,35	25,36	120	24,35	25,36
	<i>Pengadaan BMD penunjang urusan PD</i>									
	Pengadaan meubelair	Terwujudnya pengadaan meubelair	0		56,00	55,84	99,71	0	55,84	99,71
	Pengadaan peralatan dan mesin	Tersedianya peralatan	0		165,00	160,61	97,34	0	160,61	97,34

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes) kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2022	RealisasiTarget kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2020 (jutaan rupiah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2021 (jutaan rp)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/ 2021 (jutaan rupiah)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Programdan kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	lainnya	dan perlengkapan kantor								
	<i>Penyediaan jasa penunjang urusan PD</i>									
	Penyediaan surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan surat menyurat	0		4,99	3,11	62,26	6	3,11	62,26
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0		400,00	201,06	50,27	430,00	201,06	50,27
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0		37,00	14,07	38,03	50,00	14,07	38,03
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	0		17,00	8,53	50,15	20,00	8,53	50,15
	<i>Pemeliharaan BMD penunjang urusan PD</i>									
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas dan operasional	0		242,00	89,34	36,92	300,00	89,34	36,92

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes) kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2022	RealisasiTarget kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2020 (jutaan rupiah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2021 (jutaan rp)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/ 2021 (jutaan rupiah)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Programdan kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor perindag, Dekranasda, SRG dan UML	0		125,038	92,88	74,28	200	92,88	74,28
	Program Peningkatan Sarana DIstribusi Perdagangan									
	<i>Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan</i>									
	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah lokasi pemeliharaan / rehabilitasi pasar-pasar daerah	0		905,66	517,42	57,13	2.900	517,42	57,13
	Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah lokasi terlaksananya kegiatan operasional, penyediaan peralatan / sarana kebersihan pasar	0		1.829,555	1.020,82	55,80	1.000	1.020,82	55,80
	<i>Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah kerjanya</i>									
	Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah terlaksananya UPTD Pasar Intensifikasi / ekstensifikasi pemungutan retribusi pasar	0		696,68	357,17	51,27	800	357,17	51,27

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes) kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2022	RealisasiTarget kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2020 (jutaan rupiah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2021 (jutaan rp)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/ 2021 (jutaan rupiah)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Programdan kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	Terbentuknya organisasi PKL, tercapainya kesadaran PKL thd. Aturan2 yang berlaku, terlaksananya pengelolaan SRG, tersedianya THL kegiatan PKL dan SRG	0		401,18	190,70	47,53	400	190,70	47,53
	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting									
	<i>Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tk. Daerah Kab / Kota</i>									
	Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tk. Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah kegiatan pengawasan barang kebutuhan pokok dan barang penting di kab. Kebumen	0		150,05	61,37	40,90	250	61,37	40,90
	<i>Pengendalian harga, dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tk. Pasar Kab/ Kota</i>									
	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Terinformasinya harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar rakyat	0		43,49	17,16	39,44	120	17,16	39,44



No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes) kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2022	RealisasiTarget kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2020 (jutaan rupiah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2021 (jutaan rp)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/ 2021 (jutaan rupiah)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Programdan kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program pengembangan ekspor									
	<i>Penyelenggaraan promosi melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 daerah kab/kota</i>									
	Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kab / kota	Berkembangnya perdagangan LN dan perdagangan ekspor	0		192,036	45,64	23,77	250	45,64	23,77
	Program standarisasi dan Perlindungan Konsumen									
	<i>Pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan</i>									
	Pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera	Jumlah alat UTP yang ditera, tera ulang	0		125,235	61,86	49,40	350	61,86	49,40
	Program penggunaan dan pemasaran produk DN									
	<i>Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk DN</i>									
	Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk DN di tk. Kab/kota	Terlaksananya promosi dan peningkatan penggunaan produk DN	0		232,023	109,36	47,13	500	109,36	47,13
	URUSAN PERINDUSTRIAN									
	Program perencanaan dan pembangunan industri									

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes) kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2022	RealisasiTarget kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2020 (jutaan rupiah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2021 (jutaan rp)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/ 2021 (jutaan rupiah)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Programdan kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<i>Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industry kabupaten / kota</i>									
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengem-bangan, penyebaran dan perwil. industri	Terlaksananya rapat koordinasi	0		45,00	10,51	23,36	75,00	10,51	23,36
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Terlaksananya rapat koordinasi penyiapan KIHT dan pendataan IHT	0		1.347	8,91	0,66	1.347,599	8,91	0,66
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Terlaksananya pembangunan dapur bersih produksi gula semut	0		1.430,398	21,94	1,53	1.430,398	21,94	1,53
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industry dan peran serta masyarakat	Jumlah pelaku IKM yang mendapat pelatihan dan yang mendapat pendampingan	0		575,145	93,59	16,27	330	93,59	16,27
	Program pengendalian izin usaha industri									
	<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri(IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kab/Kota berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)</i>									

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes) kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2022	RealisasiTarget kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2020 (jutaan rupiah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2021 (jutaan rp)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/ 2021 (jutaan rupiah)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Programdan kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industry dalam lingkuo IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kab/kota berbasis SIINAS	Jumlah IKM yang terfasilitasi perizinannya	0		270,00	37,61	13,93	250,00	37,61	13,93
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL									
	<i>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, IPKI kewenangan kab/ kota</i>									
	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industry, data kawasan industry serta data lain lingkup kabupaten / kota melalui SIINAS	Terdatanya IKMB di kabupaten kebumen	0		50,00	4,40	8,80	100,00	4,40	8,80
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi							270		270
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan							270		270

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes) kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2022	RealisasiTarget kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2020 (jutaan rupiah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2021 (jutaan rp)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/ 2021 (jutaan rupiah)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Programdan kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota									
	<i>Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>							270		270
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian							213,978		213,978
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							213,978		213,978
	<i>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</i>							213,978		213,978
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi							377,834		377,834
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi							377,834		377,834

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes) kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2022	RealisasiTarget kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2020 (jutaan rupiah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2021 (jutaan rp)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/ 2021 (jutaan rupiah)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Programdan kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota									
	<i>Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>							377,834		377,834
								4.336,439		4.336,439
	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</b>							<b>1.958,714</b>		<b>1.958,714</b>
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan							1.958,714		1.958,714
	<i>Pendataan Potensi dan</i>							164,139		164,139

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes) kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2022	RealisasiTarget kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2020 (jutaan rupiah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2021 (jutaan rp)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/ 2021 (jutaan rupiah)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Programdan kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<i>Pengembangan Usaha Mikro</i>									
	<i>Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro</i>							224,956		224,956
	<i>Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</i>							1.569,619		1.569,619
	<b>Program Pengembangan UMKM</b>							<b>2.377,725</b>		<b>2.377,725</b>
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil							2.377,725		2.377,725
	<i>Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</i>							2.377,725		2.377,725
	Program Pengembangan UMKM							2.377.725		2.377.725
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil							2.377.725		2.377.725
	<i>Fasilitasi Usaha Mikro</i>							2.377.725		2.377.725

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes) kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2022	RealisasiTarget kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2020 (jutaan rupiah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)/2021 (jutaan rp)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/ 2021 (jutaan rupiah)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Programdan kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) / 2022 (jutaan rupiah)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<i>Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</i>									



## 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Secara umum jika dibandingkan dengan pencapaian target kinerja keuangan Tahun Anggaran 2021, maka pada Belanja pencapaian target anggaran pada Tahun Anggaran 2021 baru mencapai 88,60% terhitung sampai dengan 31 Desember 2021. Jadi masih jauh dari target yang sampai akhir bulan Desember sebesar 100 %.

Belum optimalnya realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Hambatan dan kendala yang terjadi pada lingkup teknis/ fisik kegiatan ikut mempengaruhi pencapaian target anggaran/ keuangan;
- b. Kekurang cermatan dalam penyusunan anggaran pada rekening kegiatan tertentu mengakibatkan pencapaian target anggaran/ keuangan kurang maksimal;
- c. Adanya beberapa jenis rekening yang sulit diprediksi, sehingga perhitungan anggaran untuk rekening tersebut sulit untuk tepat sesuai dengan kebutuhan/ realisasi;
- d. Adanya jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan pada akhir tahun serta penambahan anggaran di Perubahan APBD 2021 mengakibatkan kurang optimalnya capaian target kinerja keuangan pada kegiatan tersebut;
- e. Adanya beberapa kegiatan fisik yang dipihak ketigakan yang penurunan nilai kontraknya jauh dibawah pagu anggaran mengakibatkan pencapaian target anggaran/keuangan kurang maksimal.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	Prosentase Koperasi Aktif	90	92	0	0	87,11	92,34	0	0	Sangat Berhasil
2			Peningkatan Jumlah UMKM	45.457	46.057	0	0	46.460	46.100	0	0	Sangat Berhasil
3			Prosentase Pasar Tradisional dalam Kondisi baik	77,78	100	0	0	82,5	85	0	0	Sangat Berhasil
4			Jumlah Usaha Perdagangan Berijin	2.380	2.413	0	0	3.718	3.790	0	0	Sangat Berhasil
5			Jumlah Industri Kecil Menengah	54.949	54.959	0	0	56.411	56.421	0	0	Sangat Berhasil
6			Terbangunnya Kawasan Industri	0	0	0	0	0	0	0	0	Sangat Berhasil
7			Prosentase Koperasi yang Sehat	21,05	26,67	33,33	40,00	21,05	26,67	33,33	40,00	Sangat Berhasil
8			Prosentase Usaha Kecil Menengah yang Berkualitas	4,06	8,75	10,27	10,89	4,06	8,75	10,27	10,89	Sangat Berhasil
9			Prosentase Peningkatan PDRB ADHB sektor Perdagangan	-3,05	10,30	5,42	5,14	-3,05	10,30	5,42	5,14	Sangat Berhasil
10			Prosentase Peningkatan PDRB ADHB sektor Perindustrian	2,92	8,31	6,15	5,79	2,92	8,31	6,15	5,79	Sangat Berhasil

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

Pengertian isu strategis adalah kebijakan fundamental atau perhatian program yang menentukan situasi yang sangat penting dan pilihan-pilihan yang dihadapi organisasi pada waktu sekarang dan di masa depan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk merencanakan program/kegiatan yang dapat mengantisipasi isu-isu strategis tersebut.

Secara singkat, isu strategis adalah persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan terhadap masalah industri, pengembangan perdagangan, sarana perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah yang mungkin untuk diselesaikan dalam kurun waktu perencanaan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

#### 1. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Potensi sumber daya alam lokal yang belum sepenuhnya didayagunakan secara efisien dan optimal sebagai bahan baku industri, dan kondisi riil struktur industri di Kabupaten Kebumen yang masih dilaksanakan dalam skala kecil dan menengah dengan teknologi sederhana dan Sumber Daya Manusia yang relatif rendah menyebabkan beberapa jenis usaha belum siap bersaing dalam perdagangan bebas. Untuk itu perlu pengolahan bahan baku secara optimal sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomis dan bisa lebih kompetitif dalam menghadapi persaingan, melalui langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, yaitu :

- a. Pembinaan industri kecil dan menengah melalui pelatihan dan bantuan peralatan sarana produksi;
- b. Kemudahan pemberian ijin usaha bagi Industri Kecil Menengah;
- c. Fasilitasi HAKI/hak merek;
- d. Gugus kendali mutu;
- e. Monitoring dan evaluasi.

#### 2. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Globalisasi yang sedang kita hadapi mengakibatkan persaingan dagang barang dan jasa yang semakin bebas dan ketat. Untuk itu perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana perdagangan melalui program revitalisasi pasar-pasar daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan pasar yang diharapkan dapat merubah "wajah" pasar tradisional menjadi lebih higienis, nyaman dan teratur sehingga dapat bersaing dengan pasar modern, langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, yaitu :

- a. Peningkatan kelancaran distribusi barang dan jasa hasil produk dan kebutuhan masyarakat;

- b. Meningkatkan upaya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan melalui tera dan tera ulang alat UTP;
  - c. meningkatkan perdagangan produk unggulan Kabupaten Kebumen dengan memperluas jaringan bisnis dan promosi produk unggulan dengan cara mengikuti pameran tingkat nasional dan daerah;
  - d. Pengawasan barang dan jasa yang beredar, Penyediaan informasi mengenai harga kepokmas;
  - e. Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri dan membangun jejaring dengan eksportir.
  - f. Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan melalui program revitalisasi pasar-pasar daerah;
  - g. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pelayanan pasar dan retribusi kebersihan pasar dan parkir;
  - h. Pelayanan kebersihan pasar;
3. Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Menghadapi era globalisasi ini, koperasi dituntut untuk bisa tidak hanya bertahan hidup, tetapi dapat tetap bersaing dengan badan usaha-badan usaha yang lainnya, koperasi harus selalu siap dan update menghadapi perubahan zaman. Koperasi harus berdasarkan pada kualitas bukan kuantita, masih rendahnya koperasi yang aktif dan sehat disebabkan oleh faktor manajemen koperasi yang belum profesional dan belum semua koperasi di Kabupaten Kebumen yg berkinerja baik, langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, yaitu

- 1. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing produk UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri.
- 2. Penguatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan UKM.
- 3. Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat.

Untuk melengkapi dokumen ini perlu disampaikan capaian kinerja pelayanan, tantangan untuk mendapat peluang yang sangat baik di masa depan dari Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

Kinerja pelayanan publik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen cenderung mengalami peningkatan. Secara umum gambaran pelayanan publik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen sampai tahun 2020 masuk dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik mencapai skor 87,97. Namun kinerja pelayanan publik masih perlu terus ditingkatkan hingga capaian di atas skor 90.

Upaya peningkatan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik dapat ditempuh melalui beberapa hal antara lain dengan

perbaikan mutu SDM, peningkatan sarana dan prasarana layanan, serta perbaikan prosedur pelayanan.

Namun dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terdapat permasalahan dan hambatan yang di hadapi, yaitu :

1. Terbatasnya ruang gerak pelaksanaan tera ulang diakibatkan oleh situasi dampak covid-19
2. Keterbatasan sarana dan prasarana serta SDM kemetrolagian mendukung pelaksanaan tera dengan protokol kesehatan
3. Tidak terlaksananya pameran dikarenakan kondisi covid-19 untuk mematuhi protokol kesehatan yaitu berkumpulnya masa (sosial distancing)
4. Pembatasan jangkauan pasar mengakibatkan terbatasnya promosi perdagangan ke dalam dan luar negeri.
5. Masih rendahnya sarana prasarana dalam menangani dampak Covid-19 di pasar dan PKL untuk menghadapi kondisi new normal
6. Kurangnya pengembangan pemasaran online untuk memasarkan produk IKM
7. Menurunnya pendapatan retribusi pasar dikarenakan dampak covid-19 mempengaruhi penjualan para pedagang.
8. Sarana prasarana bangunan pasar belum seluruhnya layak/representatif.
9. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) berdampak pada kurang optimalnya pelayanan bagi pasar dan PKL
10. Masih rendahnya pertumbuhan UMK yang aktif memproduksi
11. Masih rendahnya koperasi yang aktif dan sehat
12. Belum tersedianya data yang akurat yang menjadi salah satu permasalahan utama dalam pengembangan Usaha Mikroyang menjamur tidak tertata, terkesan kumuh.

Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen merupakan penjabaran dari Visi Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 dan Visi Bupati Kebumen terpilih Tahun 2021 - 2026. Adapun Visi Kabupaten Kebumen 2005-2025 tersebut adalah “Kebumen Mandiri Sejahtera Berbasis Agrobisnis”, sedangkan Visi Bupati terpilih Tahun 2021 – 2026 adalah “**KEBUMEN SEMARAK** = Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”. Sedangkan sesuai misi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen menjabarkan misi ke tiga yaitu :

Misi 3 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.

1. **KUMPUL BAKUL** = Program promosi dan pengembangan jejaring produk agrobisnis dan produk lokal Kebumen melalui dropshipper, market place , katalog lokal melalui SIMBOK BLONJO

## 2. **DEMEN MBUMEN**, gerakan cinta produk kebumen

Sedangkan tantangan yang dihadapi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen adalah :

1. Beredarnya produk-produk impor yang belum memiliki standar.
2. Banyaknya produk sejenis dari daerah lain.
3. Toko-toko modern dikelola dengan manajemen profesional dan jam buka lebih lama.
4. Masih rendahnya profesionalisme pelaku usaha.
5. Sebagian lokasi pasar dipandang kurang strategis; revitalisasi pasar belum mampu memulihkan kondisi pasar
6. Kesan pasar rakyat tidak ada kepastian harga, kumuh, becek, dan kurang tertata Pedagang kaki lima
7. Masih rendahnya pertumbuhan UMK yang aktif memproduksi
8. Masih rendahnya koperasi yang aktif dan sehat
9. Belum tersedianya data yang akurat yang menjadi salah satu permasalahan utama dalam pengembangan Usaha Mikro yang menjamur tidak tertata, terkesan kumuh.

Beberapa peluang untuk meningkatkan pelayanan sesuai tugas dan fungsi diantaranya :

1. Telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang antimonopoli dan persaingan tidak sehat.
2. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang konsisten mendukung perkembangan perdagangan
3. Penerapan Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Permendag No. 70 tahun 2013 tentang Penataan pasar tradisional dan toko modern.
5. Komitmen pemerintah Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang-pedagang pasar rakyat
6. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan tuntutan semua elemen warga dan sebagai alternatif bagi konsumen dalam penyediaan barang.
7. Pasar Rakyat adalah (bukan peluang kalau ada adalah) salah satu sumber pendapatan yang potensial
8. Pedagang Pasar Rakyat adalah wirausahawan yang berpotensi membuka lapangan kerja.
9. Koperasi dan UMKM menjadi salah bidang prioritas unggulan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang akan diintervensi dalam bentuk program dan kegiatan.
10. Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi serta stakeholder yang lain dalam upaya program pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Peran dan posisi Dinas Perindustrian Perdagangan Usaha Kecil dan Menengah sangat penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan, koordinasi, dan sinergi program dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah maupun kementerian dan lembaga di tingkat pusat perlu ditingkatkan. Dengan potensi yang begitu besar

yang ada di Kabupaten Kebumen mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusia yang sangat potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal sehingga belum bisa mencapai apa yang diharapkan oleh masyarakat di Kabupaten Kebumen.

Dengan semua kekurangan dan keterbatasan bukan alasan untuk menyerah, tapi sebagai tantangan untuk mendapat peluang yang sangat baik di masa depan, dalam rangka meningkatkan pelayanan diantaranya :

1. Memaksimalkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan.
2. Meningkatkan pemasaran produk unggulan IKM/UMKM melalui penjualan online
3. Meningkatkan kualitas IKM/UMKM dan Koperasi melalui pelatihan dan pembinaan
4. Melakukan pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan kegiatan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan new normal dengan memperhatikan protokol kesehatan diantara : anjuran memakai masker, anjuran menjaga jarak, melakukan sosial distancing baik pedagang dan pembeli di pasar, memfasilitasi tempat cuci tangan, dan penyemprotan disinfektan )
5. Mengkondisikan kegiatan pelatihan, pengawasan perdagangan, dan pelaksanaan tera ulang menggunakan protokol kesehatan .
6. Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pasar dan PKL dengan kondisi new normal

#### 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal serta menjadi pedoman dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah sewajarnya apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara kebutuhan dan keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, perlu dilakukan seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Tema pembangunan daerah tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas Infrastruktur dalam rangka Pemulihan Ekonomi serta Penerapan Open-Gov dan Pengembangan Sistem Pendidikan dan Kesehatan Adaptif Bencana”, dengan prioritas pembangunan antara lain yaitu:

1. Penerapan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi melalui e-gov dan peningkatan kapabilitas aparatur.
2. Penerapan pelayanan pendidikan dan sistem kesehatan yang adaptif pandemi.
3. Pemulihan kapasitas ekonomi melalui pemberdayaan potensi lokal berbasis komoditas unggulan.



4. Perbaikan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian daerah.
5. Peningkatan kondusivitas wilayah dan mitigasi bencana.

Adapun review Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023, dapat dilihat dalam table 2.3. berikut:

Tabel 2.3.  
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAHKABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2022

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Knerja PD					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Knerja PD					
	a Penyusunan dokumen perencanaan PD	Dinas Perindag	Jumlah dokumen Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, DPP, LKJIP, Tapkin, LKPJ/LPPD, Renstra	10 dokumen	50.000.000	A Penyusunan dokumen perencanaan PD	Dinas Perindag	Jumlah dokumen Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, DPP, LKJIP, Tapkin, LKPJ/LPPD, Renstra	10 dokumen	50.000.000	
	b Evaluasi Kinerja Perangkat Daearh	Dinas Perindag	Jumlah data pedagang pasar dan aset	6 dokumen	35.000,000	B Evaluasi Kinerja Perangkat Daearh	Dinas Perindag	Jumlah data pedagang pasar dan aset	6 dokumen	35.000,000	
	Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah					Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	a Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Dinas Perindag	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan (orang)	112 orang	10.425.300.000	A Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Dinas Perindag	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan (orang)	112 orang	10.424.944.000	
	b Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dinas Perindag	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (dokumen	12 dokumen	125.000.000	B Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dinas Perindag	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (dokumen	12 dokumen	125.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
	a Sosialisasi Peraturan Per UU	Dinas Perindag	Jumlah sosialisasi (kegiatan)	7 kegiatan	100.000.000	A Sosialisasi Peraturan Per UU	Dinas Perindag	Jumlah sosialisasi (kegiatan)	7 kegiatan	100.000.000	
	b Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Dinas Perindag	jumlah pegawai ASN yang mengikuti ASN Gathering untuk peningkatan kapabilitas (orang)	105 orang	105.000.000	B Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		jumlah pegawai ASN yang mengikuti ASN Gathering untuk peningkatan kapabilitas (orang)	105 orang	105.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					

1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
	a	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12 bulan	25.000.000	a	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan kantor	12 bulan	25.000.000	
	b	Penyediaan bahan logistic kantor	Dinas Perindag	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	30.000.000	b	Penyediaan bahan logistic kantor		Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	30.000.000	
	c	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perindag	Jumlah bulan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	350.000.000	c	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah bulan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	350.000.000	
	d	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan PerUU	Dinas Perindag	Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	5.000.000	d	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan PerUU		Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	5.000.000	
	e	Penyediaan bahan / material	Dinas Perindag	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	12 bulan	65.000.000	e	Penyediaan bahan / material		Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	12 bulan	65.000.000	
	f	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Perindag	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (bulan)	12 bulan	120.000.000	f	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (bulan)	12 bulan	120.000.000	
	g	Penatausahaan arsip dinamis SKPD	Dinas Perindag	Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 bulan	15.000.000	g	Penatausahaan arsip dinamis SKPD		Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 bulan	15.000.000	
	Pengadaan BMD Penunjang urusan Pemerintah Daerah						Pengadaan BMD Penunjang urusan Pemerintah Daerah						
	a	Pengadaan meubel	Dinas Perindag	Terpenuhinya peralatan untuk gedung kantor	0	0	a	Pengadaan meubel	Dinas Perindag	Terpenuhinya peralatan untuk gedung kantor	0	0	
	b	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Dinas Perindag	Tersedianya meubelair	0	0	b	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Dinas Perindag	Tersedianya meubelair	0	0	
	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah						Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah						

1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
	a	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	6.000.000	a	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	6.000.000	
	b	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	430.000.000	b	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	400.000.000	
	c	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bula	50.000.000	c	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bula	50.000.000	
	d	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	20.000.000	d	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	20.000.000	
	Kegiatan Pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemda						Kegiatan Pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemda						
	a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara	62 unit	200.000.000	a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara	62 unit	200.000.000	
	b	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Dinas Perindag	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lain terpelihara	4 unit	100.000.000	b	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Dinas Perindag	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lain terpelihara	4 unit	100.000.000	
	Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan						Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan						
	a	Penyediaan sarana distribusi perdagangan		jml unit sarana dan distribusi perdagangan yg tersedia (pengadaan tanah dan bangunan pasar)	4 UPTD	1.000.000.000	a	Penyediaan sarana distribusi perdagangan		jml unit sarana dan distribusi perdagangan yg tersedia (pengadaan tanah dan bangunan pasar)	4 UPTD	1.000.000.000	

1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
	b	Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan		jml pasar yg terlayani kebersihan dan tersedianya SDM pengelola (Unit)	4 UPTD	1.900.000.000	b	Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan		jml pasar yg terlayani kebersihan dan tersedianya SDM pengelola (Unit)	4 UPTD	1.900.000.000	
	Kegiatan : Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya						Kegiatan : Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya						
	a	Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan		jml Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (unit)	4 unit	800,000,000	a	Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan		jml Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (unit)	4 unit	800,000,000	
	b	Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan		jml pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan (Kegiatan)	4 kegiatan	400,000,000	b	Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan		jml pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan (Kegiatan)	4 kegiatan	400,000,000	
6	Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kegiatan : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tk. Daerah Kab/Kota						Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kegiatan : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tk. Daerah Kab/Kota						
	a	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Dinas Perindag	Jumlah kegiatan pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting (kali)	277 kali	250,000,000	a	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Dinas Perindag	Jumlah kegiatan pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting (kali)	277 kali	250,000,000	
7	Kegiatan : Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tk. Pasar kab/kota						Kegiatan : Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tk. Pasar kab/kota						
	a	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah hari pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting (hari)	365 hari	120.000.000	a	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah hari pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting (hari)	365 hari	120.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Program Pengembangan Ekspor Kegiatan : Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 daerah kab/kota					Program Pengembangan Ekspor Kegiatan : Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 daerah kab/kota					
	a Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		Jumlah Pembinaan dan Promosi Pengembangan Usaha Produk Ekspor (Kegiatan)	2 kegiatn	250.000.000	a Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		Jumlah Pembinaan dan Promosi Pengembangan Usaha Produk Ekspor (Kegiatan)	2 kegiatn	250.000.000	
9	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kegiatan : Pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan					Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kegiatan : Pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan					
	a Pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang		jml pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal (Unit)	2780 UTTP	350.000.000	a Pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang		jml pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal (Unit)	2780 UTTP	350.000.000	
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Kegiatan : Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri					Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Kegiatan : Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri					
	a Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk DN di tk. Kab/kota		Jumlah kegiatan Pemasaran Produk dalam negeri (Kegiatan)	4 kegiatan	400.000.000	a Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk DN di tk. Kab/kota		Jumlah kegiatan Pemasaran Produk dalam negeri (Kegiatan)	4 kegiatan	400.000.000	
	BIDANG PERINDUSTRIAN										
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Kegiatan : Penyusunan, penerapan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab./Kota	Dinas Perindag				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Kegiatan : Penyusunan, penerapan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab./Kota					
	a Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pemantauan perwilayahan industri (kali)	20 kali	75.000.000	a Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pemantauan perwilayahan industri (kali)	20 kali	75.000.000	

1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
	b	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan pembangunan sumber daya industri		Jumlah perencanaan/pembangunan kawasan industri hasil tembakau (kegiatan)	2 kegiatan	1.347.599.000	b	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan pembangunan sumber daya industri		Jumlah perencanaan/pembangunan kawasan industri hasil tembakau (kegiatan)	2 kegiatan	1.347.599.000	
	c	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri		Jumlah perkumpulan industri yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana industri (kelompok)	2 kelompok	1.460.398.000	c	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri		Jumlah perkumpulan industri yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana industri (kelompok)	2 kelompok	1.460.398.000	
	d	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah pelaku industri yang terbina (orang)	80 orang	330.000.000	d	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah pelaku industri yang terbina (orang)	80 orang	330.000.000	
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)						Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)						
	a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		jml dokumen perijinan industri yg terfasilitasi (Dokumen)	150 dokumen	250.000.000	a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		jml dokumen perijinan industri yg terfasilitasi (Dokumen)	150 dokumen	250.000.000	
11	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						

1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
	a	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		jml dokumen Data Industri (Dokumen)	1 dokumen	100.000.000	a	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		jml dokumen Data Industri (Dokumen)	1 dokumen	100.000.000	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH												
12	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						
	a	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang patuh terhadap Peraturan Perundang- undangan Kab/Kota	80 koperasi	270.000.000	a	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang patuh terhadap Peraturan Perundang- undangan Kab/Kota	80 koperasi	270.000.000	
13	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						
	a	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM koperasi yang kompeten	150 orang	213.978.000	a	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM koperasi yang kompeten	150 orang	213.978.000	
	<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b> Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b> Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						



1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
	a	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	60 orang	377.834.000	a	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	60 orang	377.834.000	
14	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</b> Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</b> Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						
	a	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang teridentifikasi berpotensi naik kelas	200 unit	164.139.000	a	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang teridentifikasi berpotensi naik kela	200 unit	164.139.000	
	b	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		jml ukm yg memiliki sertifikasi dan standar mutu produk	75 unit	224.956.000	b	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		jml ukm yg memiliki sertifikasi dan standar mutu produk	75 unit	224.956.000	
	c	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		jml bintek yang terselenggara dalam pengembangan kapasitas umkm	7 kegiatan	1.569.619.000	c	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		jml bintek yang terselenggara dalam pengembangan kapasitas umkm	7 kegiatan	1.569.619.000	
	<b>Program Pengembangan UMKM</b> Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						<b>Program Pengembangan UMKM</b> Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						
	a	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Jml UKM yang meningkat skala usahanya	225 UMKM	2.377.725.000	a	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Jml UKM yang meningkat skala usahanya	225 UMKM	2.377.725.000	
<b>J U M L A H</b>						<b>26.487.548.000</b>						<b>26.487.548.000</b>	

Sumber : Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2022

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Kebumen membuka akses yang luas kepada masyarakat dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya melalui mekanisme Musyawaran Perencanaan Pembangunan atau disingkat musrenbang. Berdasarkan hasil musrenbang tingkat Kecamatan yang sudah dilaksanakan pada awal tahun 2022, Usulan Musrenbangcam, Kuota Kecamatan dan Pokir DPRD yang masuk ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2023 yang terakomodir disajikan dalam tabel berikut .

TABEL 2.4.  
Usulan Musrenbangcam, Kuota Kecamatan dan Pokir DPRD  
Tahun Anggaran 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		Persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT	4 %	
	Kegiatan : Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab Kebumen	Jumlah Industri yg terbina (orang)	80 orang	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah pelaku industri yang terbina (orang)	Rp 101.000.000 / 80 orang	
2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah ,Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		Jumlah bintek yang terselenggara dalam pengembangan kapasitas umkm	10.49 %	
	Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah dokumen perijinan industri yg terfasilitasi (Dokumen)	7 Kegiatan	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kebumen	Jumlah bintek yang terselenggara dalam pengembangan kapasitas umkm	150.000.000 / 7Kegiatan	
3	Program Pengembangan UMKM		Persentase Usaha Kecil	2,94 %	
	Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Jumlah UKM yang meningkat skala usahanya	100 UMKM	
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Kebumen	Jumlah UKM yang meningkat skala usahanya	Rp 300.000.000 / 225 UMKM	
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Persentase Advokasi kepada Koperasi	22,19%	
	Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	60 orang	
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Rp 216.000.000 / 60 orang	

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN**

3.1.Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaah Renstra Kementerian Perindustrian

Dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 telah menyinkronkan dengan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2017-2022 yaitu:

TABEL 3.1  
PERMASALAHAN PELAYANAN PD  
BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS KEMENTRIAN PERINDUSTRIAN  
BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG

SasaranStrategis	Permasalahan PelayananPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
Kebijakan pengembangan Sumber daya industri	Kurangnya Peningkatan Tenaga kerja Industri yang kompeten.	Keterbatasan SDM	Pelatihan industri berbasis kompetensi
Kebijakan Pengembangan sarana Dan prasarana industri	Belum terlaksananya Pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan standardisasi industri;	Kurangnya pendampingan perusahaan berstandar industri	Pendampingan Standarisasi industri
Kebijakan Pemberdayaan industri.	Kurangnya kemampuan industri dalam negeri.	Kurangnya penggunaan teknologi untuk peningkatan industri dalam negeri	Adanya dorongan Penggunaan teknologi Guna peningkatan Industri dalam negeri
Kebijakan pengembangan perwilayahan industri	Belum terbentuknya Penetapan KPI	Masihadanya Pembahasan lebih lanjut ke tingkat yang lebih tinggi	Adanya Dukungan Dana DBHCHT Untuk pembuatan Kawasan Industri Rokok

SasaranStrategis	Permasalahan PelayananPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
Kebijakan fasilitas fiskal dan non fiskal	Kurangnya inovasi, invensi dan penguasaan teknologi baru	Keterbatasan SDM	Upaya mendorong industri melakukan inovasi, invensi, dan penguasaan teknologi baru.

3.1.2 Telaah Renstra Kementrian Perdagangan

Dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 telah menyinkronkan dengan Renstra Kementrian Perdagangan Tahun 2017-2022 yaitu:

TABEL 3.2.  
PERMASALAHAN PELAYANAN PD  
BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS KEMENTRIAN PERDAGANGAN  
BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG

Sasaran Strategis	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa	Belum optimalnya ekspor produk unggulan	Kurangnya SDM Yang menguasai Ekspor dan belum banyaknya usaha yang mempunyai ijin usaha	Banyak kualitas produk unggulan yang banyak
Meningkatnya Diversifikasi Pasar dan Produk Ekspor	Ekspor masih Didominasi produk Mebel	Belum banyak Produk unggulan Yang mampu Menembus pasar ekspor	Perlu peningkatan kualitas produk

3.1.3. Renstra Dinas Peridustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Selain itu dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 juga telah menyinkronkan dengan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

TABEL 3.3.

PERMASALAHAN PELAYANAN PD BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG

Sasaran Strategis	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
Meningkatnya pertumbuhan Industri	Belum optimalnya pertumbuhan industri	Masuknya industri Besar	Peningkatan SDM dengan bintek dan magang
Meningkatnya nilai ekspor non migas	Belum optimalnya ekspor produk ekspor selain gula semut	Kendala perijinan dan transportasi	Perlu pengetahuan tentang ekspor
Menurunnya peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai standar; dan	Belum terkontrolnya peredaran barang di masyarakat	Kurangnya anggaran dan SDM untuk kegiatan pengawasan	Perlu sosialisasi kepada masyarakat supaya menjadi konsumen cerdas
Terwujudnya sistem distribusi yang efektif dan efisien.	Belum terkontrolnya peredaran barang di masyarakat	Kurangnya anggaran dan SDM untuk kegiatan pengawasan	Perlu sosialisasi kepada masyarakat supaya menjadi konsumen cerdas

Perkembangan situasi nasional menuntut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen untuk terus melakukan pengembangan/pembaharuan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sehingga dapat beroperasi secara lebih efektif, efisien dan ekonomis serta memiliki akuntabilitas. Program prioritas kebijakan pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Peningkatan sarana Distribusi Perdagangan;
3. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
4. Program Pengembangan Ekspor;
5. Program Standarisasi harga dan Perlindungan Konsumen;
6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
8. ProgramPengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota;
9. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
10. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
11. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
12. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;

13. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
14. Program Pengembangan UMKM

Perkembangan inilah yang membawa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen harus menjadi salah satu institusi penggerak perekonomian rakyat yang responsif, antisipatif, handal dan mampu mempercepat mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan nasional yang terkait dan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun Kedua dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 serta harus memperhatikan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Berdasarkan Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen yang tertuang melalui indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dalam pelaksanaan RPJMD adalah mendukung misi/agenda ke-3 Bupati terpilih tahun 2021-2026. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman atau acuan bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, rencana kerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan untuk mengevaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023, seharusnya didasarkan atas Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dan atas dasar isu-isu strategis penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



TABEL 3.4.

Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian,  
Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten  
Kebumen Tahun 2023

Visi: Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri,  
Berakhlak Bersama Rakyat

Misi ke 3 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui  
pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan  
kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi  
kerakyatan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022
1	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	4.339,72 Milyar Rupiah
		Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	11.674,7 4 Milyar Rupiah

3.3. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 7 Tahun 2021 maka terbentuk Perangkat Daerah Baru yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. Setelah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 7 Tahun 2021 ditetapkan maka berdampak bahwa bidang di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen bertambah menjadi 4 (empat) yaitu Bidang Perindustrian, Sarana Perdagangan, Pengembangan Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Jika rumusan program dan kegiatan yang dirinci tidak sesuai dengan rancangan awal RK maka akan berdampak pada capaian kinerja baik program maupun kegiatan. Dan diharapkan kebutuhan anggaran yang ada di rumusan rencana kerja dapat sesuai dengan yang diharapkan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

Dalam Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 telah menetapkan rencana program dan kegiatan sebanyak 14 (empat belas) program dengan 21 (dua puluh satu) Kegiatan dan 41 (empat puluh satu ) sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu waktu 1 (satu) tahun dan telah disetujui dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, adapun program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.5  
Program, Kegiatan dan Sub kegiatan  
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								5,220,083,000					6,617,603,000
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								278,100,000					286,444,000
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota								278,100,000					286,444,000
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 Unit		278,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				286,444,000
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								221,628,000					2,290,508,000
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								221,628,000					2,290,508,000
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase SDM Koperasi Yang Kompeten	Jumlah SDM koperasi yang kompeten	Jumlah SDM koperasi yang kompeten	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,36 %	135 Orang	135 Orang	221,628,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SDM Koperasi Yang Kompeten	20,36 %	2,290,508,000
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								321,189,000					330,825,000
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota								321,189,000					330,825,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi kepada Koperasi	Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,59 %	165 Orang	165 Unit	321,189,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Advokasi kepada Koperasi	29,59 %	330,825,000
2	17	07			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>								<b>3,306,246,000</b>					<b>3,709,826,000</b>
2	17	07	2.01		<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>								<b>3,306,246,000</b>					<b>3,709,826,000</b>
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang teridentifikasi berpotensi naik kelas		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		210 Unit		198,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				204,844,000
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah ukm yg memiliki sertifikasi dan standar mutu produk		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		90 Unit		300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				316,656,000
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah bintek yang terselenggara dalam pengembangan kapasitas umkm		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14 Kali		2,807,326,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,188,326,000
2	17	08			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>								<b>1,092,920,000</b>					<b>0</b>
2	17	08	2.01		<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>								<b>1,092,920,000</b>					<b>0</b>
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Jumlah UKM yang meningkat skala usahanya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		225 Orang		1,092,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
<b>3</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>													
3	30				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>								<b>19,139,888,000</b>					<b>19,714,236,000</b>

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								12,599,138,000					12,981,364,000
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								85,000,000					85,000,000
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000
3	30	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35,000,000
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10,707,488,000					10,861,884,000
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		10,572,488,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,721,884,000
3	30	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD yang tersusun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen		135,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				140,000,000
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								207,000,000					207,000,000
3	30	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai ASN yang mengikuti ASN Gathering untuk peningkatan kapabilitas		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		107 Orang		107,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				107,000,000
3	30	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah sosialisasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Kegiatan		100,000,000	DBH CHT				100,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								611,650,000					613,300,000
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		25,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				26,500,000
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		30,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				31,800,000
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah bulan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				350,000,000
3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,000,000
3	30	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				65,000,000
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				120,000,000
3	30	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								50,000,000					50,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Unit		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								532,000,000					552,000,000
3	30	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah bulanPenyediaan Jasa Surat Menyurat		Semua Kab/Kota, Semua		12 Bulan		6,000,000	Dana Transfer Umum-				6,000,000
									Kecamatan, Semua Kelurahan					Dana Alokasi Umum				
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		451,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				466,000,000
3	30	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				60,000,000
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								406,000,000					612,180,000
3	30	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		206,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				412,180,000
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lain terpelihara		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Unit		200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								4,982,000,000					5,114,360,000
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								3,750,000,000					3,850,000,000
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah unit sarana dan distribusi perdagangan yg tersedia (pengadaan tanah dan bangunan pasar)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 UPTD		1,800,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,850,000,000
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah pasar yg terlayani kebersihan dan tersedianya SDM pengelola		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 UPTD		1,950,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,000,000,000
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya								1,232,000,000					1,264,360,000
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 UPTD		820,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				840,000,000
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Kegiatan		412,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				424,360,000
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								400,000,000					425,000,000
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								250,000,000					250,000,000
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat								250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				250,000,000
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								150,000,000					175,000,000



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Jumlah hari pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		365 Hari		150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				175,000,000
3	30	05			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>								<b>257,500,000</b>					<b>265,225,000</b>
3	30	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>257,500,000</b>					<b>265,225,000</b>
				01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		Jumlah Pembinaan dan Promosi Pengembangan Usaha Produk Ekspor		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Kegiatan		257,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				265,225,000
3	30	06			<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>								<b>360,500,000</b>					<b>371,315,000</b>
3	30	06	2.01		<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>								<b>360,500,000</b>					<b>371,315,000</b>
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3035 Unit		360,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				371,315,000
3	30	06			<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>								<b>540,750,000</b>					<b>556,972,000</b>
3	30	06	2.01		<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>								<b>540,750,000</b>					<b>556,972,000</b>
3	30	06	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota								540,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				556,972,000
3	31				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>								<b>3,776,639,000</b>					<b>3,811,960,000</b>
3	31	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>								<b>3,166,639,000</b>					<b>3,176,960,000</b>
3	31	02	2.01		<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>								<b>3,166,639,000</b>					<b>3,176,960,000</b>
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri								75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				75,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah perencanaan/pembangunan kawasan industri hasil tembakau		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Kegiatan		1,347,599,000	DBH CHT				1,347,599,000
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri								1,400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,400,000,000
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah pelaku industri yang terbina		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300 Orang		344,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				354,361,000
3	31	03			<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>								<b>500,000,000</b>					<b>515,000,000</b>
3	31	03	2.01		<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>								<b>500,000,000</b>					<b>515,000,000</b>
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota								500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				515,000,000
3	31	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>								<b>110,000,000</b>					<b>120,000,000</b>
3	31	04	2.01		<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>								<b>110,000,000</b>					<b>120,000,000</b>
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)								110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				120,000,000
<b>TOTAL</b>									<b>28,136,610,000</b>					<b>30,143,799,000</b>				

#### BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGGH KABUPATEN KEBUMEN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pada dasarnya kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 adalah sebagai “pengarah” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Secara lebih lengkap mengenai Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat dilihat dalam table 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									5,220,083,000				6,617,603,000
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI									278,100,000				286,444,000
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota									278,100,000				286,444,000
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 Unit		278,100,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				286,444,000
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN									221,628,000				2,290,508,000
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota									221,628,000				2,290,508,000
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase SDM Koperasi Yang Kompeten	Jumlah SDM koperasi yang kompeten	Jumlah SDM koperasi yang kompeten	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,36 %	135 Orang	135 Orang	221,628,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase SDM Koperasi Yang Kompeten	20,36 %	2,290,508,000
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI									321,189,000				330,825,000
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota									321,189,000				330,825,000
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi kepada Koperasi	Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,59 %	165 Orang	165 Unit	321,189,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Advokasi kepada Koperasi	29,59 %	330,825,000
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)									3,306,246,000				3,709,826,000
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan									3,306,246,000				3,709,826,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang teridentifikasi berpotensi naik kelas		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		210 Unit		198,920,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				204,844,000
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah ukm yg memiliki sertifikasi dan standar mutu produk		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		90 Unit		300,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				316,656,000
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah bintek yang terselenggara dalam pengembangan kapasitas umkm		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14 Kali		2,807,326,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3,188,326,000
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								1,092,920,000					0
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil								1,092,920,000					0
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Jumlah UKM yang meningkat skala usahanya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		225 Orang		1,092,920,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								19,139,888,000					19,714,236,000
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								12,599,138,000					12,981,364,000
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								85,000,000					85,000,000
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				50,000,000
3	30	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								35,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				35,000,000
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10,707,488,000					10,861,884,000
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		10,572,488,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				10,721,884,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	30	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD yang tersusun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen		135,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				140,000,000
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								207,000,000					207,000,000
3	30	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai ASN yang mengikuti ASN Gathering untuk peningkatan kapabilitas		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		107 Orang		107,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				107,000,000
3	30	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah sosialisasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Kegiatan		100,000,000	DBH CHT				100,000,000
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								611,650,000					613,300,000
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		25,750,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				26,500,000
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		30,900,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				31,800,000
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah bulan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		350,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				350,000,000
3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5,000,000
3	30	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		65,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				65,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								120,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				120,000,000
3	30	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				15,000,000
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								50,000,000					50,000,000
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Unit		50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				50,000,000
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								532,000,000					552,000,000
3	30	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah bulanPenyediaan Jasa Surat Menyurat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		6,000,000	Dana Transfer Umum-				6,000,000
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		451,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				466,000,000
3	30	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		55,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				60,000,000
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		20,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				20,000,000
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								406,000,000					612,180,000
3	30	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		206,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				412,180,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lain terpelihara		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Unit		200,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				200,000,000
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								4,982,000,000					5,114,360,000
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								3,750,000,000					3,850,000,000
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah unit sarana dan distribusi perdagangan yg tersedia (pengadaan tanah dan bangunan pasar)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 UPTD		1,800,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1,850,000,000
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah pasar yg terlayani kebersihan dan tersedianya SDM pengelola		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 UPTD		1,950,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2,000,000,000
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya								1,232,000,000					1,264,360,000
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 UPTD		820,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				840,000,000
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Kegiatan		412,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				424,360,000
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								400,000,000					425,000,000
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								250,000,000					250,000,000
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat								250,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				250,000,000
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								150,000,000					175,000,000
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Jumlah hari pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		365 Hari		150,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				175,000,000



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								257,500,000					265,225,000
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								257,500,000					265,225,000
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		Jumlah Pembinaan dan Promosi Pengembangan Usaha Produk Ekspor		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Kegiatan		257,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				265,225,000
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								360,500,000					371,315,000
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								360,500,000					371,315,000
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3035 Unit		360,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				371,315,000
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								540,750,000					556,972,000
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri								540,750,000					556,972,000
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota								540,750,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				556,972,000
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								3,776,639,000					3,811,960,000
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								3,166,639,000					3,176,960,000
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								3,166,639,000					3,176,960,000
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri								75,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				75,000,000
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah perencanaan/pembangunan kawasan industri hasil tembakau		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Kegiatan		1,347,599,000	DBH CHT				1,347,599,000
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri								1,400,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1,400,000,000
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah pelaku industri yang terbina		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300 Orang		344,040,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				354,361,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA								500,000,000					515,000,000
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota								500,000,000					515,000,000
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota								500,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				515,000,000
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL								110,000,000					120,000,000
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota								110,000,000					120,000,000
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)								110,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				120,000,000
TOTAL									28,136,610,000					30,143,799,000				

## BAB V PENUTUP

Renja atau Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ketiga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 berdasarkan acuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah disusun bertujuan untuk mengkoordinasikan dan memberikan arah dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang berisi tentang rencana pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2023 pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang industri, perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan tujuannya penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 mengacu pada usulan dari Desa/Kecamatan, pokok-pokok pikiran, prioritas kegiatan Organisasi Perangkat Daerah, dan pagu indikatif. Secara keseluruhan untuk melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun 2023 akan dibiayai dengan pagu indikatif anggaran sebesar Rp.26,136,610,000,- (Dua puluh enam milyar seratus tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Kebumen, anggaran tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan 14 (empat belas) program yang dijabarkan kedalam 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan.

Keberhasilan pembangunan industri, perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah maupun pembangunan ekonomi secara keseluruhan khususnya ekonomi kerakyatan merupakan prioritas yang sangat vital dalam mempercepat pembangunan daerah dan memperkuat ketahanan ekonomi di Kabupaten Kebumen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahun 2023.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL  
DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

  
**Drs. FRANS HAIDAR, MPA**

PembinaUtama Muda  
NIP.19681229 199009 1 001